

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor maupun impor. Perdagangan internasional dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni perdagangan fisik (barang) dan perdagangan jasa. Perdagangan fisik misalnya perdagangan komoditas pertanian, hasil hutan, hasil laut, hasil industri dan sebagainya. Sedangkan perdagangan jasa misalnya biro perjalanan (travel), pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia, pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri dan sebagainya (Tambunan, 2000).

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah (Wikipedia, 2009).

Selanjutnya suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain karena terbukanya hubungan antar negara, yang pada akhirnya masing-masing negara akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan perdagangan, sehingga setiap negara berusaha untuk melakukan efisiensi produksi yang mampu menciptakan keunggulan komparatif terhadap negara lain. Pola hubungan persahabatan antar negara dengan negara lain juga menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional dengan pola perdagangan tertentu (Tambunan, 2000).

Banyak teori yang membahas tentang perdagangan internasional. Teori-teori tersebut biasanya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni teori klasik dan teori modern.

Teori keunggulan absolute (*absolute advantage*) dari Adam Smith, dalam Tambunan (2001) yang disebut sebagai teori murni perdagangan internasional menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi dan ekspor terhadap suatu jenis barang tertentu di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi atau melakukan impor terhadap jenis barang lain di mana negara tersebut tidak mempunyai keunggulan absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis.

Selanjutnya J.S Mill, dalam Tambunan (2001) menyatakan bahwa suatu negara akan berspesialisasi pada dan mengekspor suatu barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komperatif terbesar (suatu barang yang dapat dihasilkan dengan ongkos produksi paling rendah) dan mengimpor barang dimana negara itu memiliki kerugian komperatif (*conperative disadvantage*) (barang yang kalau dibuat sendiri memakan ongkos paling besar).

Dasar pemikiran lainnya adalah bahwa perdagangan antara dua negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Jadi, penekanannya terdapat pada perbedaan efisiensi relatif antarnegara dalam memproduksi dua (atau) lebih jenis barang yang menjadi dasar timbulnya perdagangan internasional menurut teori David Ricardo, dalam Tambunan (2001).

Teori perdagangan kelimpahan faktor (*factor-endowment trade theory*) atau teori proporsi variable (*variable-proportion theory*) neoklasik Heckser-Ohlin

(H-O) yang merupakan modifikasi pemikiran David Ricardodan J.S Mill berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif (Wikipedia, 2009).

Teori kelimpahan faktor selanjutnya mengemukakan bahwa negara-negara yang kaya modal, seharusnya berspesialisasi pada aneka produk yang juga bersifat padat modal, seperti mobil, pesawat terbang, peralatan komunikasi yang canggih, serta komputer (disini mesin modern dan teknologi maju dikategorikan sebagai modal, jadi pengertian modal disini tidak terbatas pada dana-dana finansial semata) dan mengekspornya kemudian sebagai gantinya mengimpor komoditi padat tanah dan padat tenaga kerja (Todaro, 2000).

Berikutnya teori permintaan dan penawaran yang dasar pemikirannya mengatakan bahwa perdagangan antara dua (2) negara (atau lebih) timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan ataupun penawaran. Permintaan berbeda disebabkan perbedaan-perbedaan dalam faktor-faktor determinan berikut: tingkat harga (inflasi), tingkat pendapatan, dan selera masyarakat antara kedua negara tersebut. Sedangkan penawaran berbeda karena perbedaan-perbedaan di dalam jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang diperlukan / digunakan, tingkat kemajuan teknologi, dan faktor-faktor eksternal (Tambunan, 2001).

Teori Vent for Surplus Theory mengatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk-produk yang dibuatnya apabila terjadi excess supply (kelebihan stok) di pasar dalam negeri (Tambunan, 2001)



Selanjutnya menurut teori Product Cycle Theory bahwa setiap produk atau suatu industri sesuai dengan perubahan waktu akan melalui suatu proses (bisa panjang bisa pendek) dari tahap pengembangan (inovasi) hingga tahap kejenuhan (maturity) dan tahap penurunan produksi, selama kondisi-kondisi yang mempengaruhi proses produksi dan location requirements berubah terus secara sistematis (Tambunan, 2001).

Akibat dari teori-teori sebelumnya yang tidak mampu menerangkan perkembangan ekspor nonmigas dan perubahan struktur perdagangan global dari komoditas primer ke barang-barang elektronik, maka timbul pemikiran baru bahwa perkembangan ekspor nonmigas dari suatu negara tidak hanya ditentukan oleh keunggulan komparatif, tetapi juga oleh keunggulan kompetitif. Keunggulan alamiah dapat diartikan sebagai keunggulan komparatif (seperti yang dimaksud dalam teori-teori klasik dan modern), sedangkan keunggulan yang diciptakan adalah keunggulan yang bersifat kompetitif. (Tambunan, 2001).

Keunggulan kompetitif ini ditentukan oleh empat determinan yaitu: keunggulan komparatif, permintaan di pasar domestik baik kualitatif maupun kuantitatif, struktur industri dalam negeri yang kuat, dan struktur pasar dengan persaingan bebas sepenuhnya. Keunggulan kompetitif ini sifatnya lebih dinamis dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat dibandingkan dengan keunggulan komparatif (Indoskripsi, 2009).

2.2 Perdagangan Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi

Perdagangan internasional telah memainkan peranan yang sangat penting di sepanjang sejarah pembangunan negara-negara berkembang. Peranan

perdagangan internasional dalam pembangunan ekonomi cukup menonjol. Perdagangan internasional telah memberikan sumbangan luar biasa bagi pembangunan negara kurang berkembang di abad ke-19 dan 20 dan dapat diharapkan sumbangan tersebut akan sama di masa datang (Haberler dalam Jhingan, 2008).

Perdagangan merupakan faktor penting guna merangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk ekspor, yang mana jika tidak tersedia, maka negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomiannya (Todaro, 2000).

Menurut Jhingan (2008) perdagangan dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan yang dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi dengan : (a) memungkinkan negara terbelakang memperoleh bagian besar dari manfaat perdagangan; (b) meningkatkan laju pembentukan modal; (c) meningkatkan industrialisasi; dan (d) menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Perdagangan dapat membantu semua negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta pengutamaan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keunggulan komperatif baik berupa ketersediaan faktor-faktor produksi tertentu dalam jumlah yang melimpah, atau keunggulan efisiensi alias produktivitas di setiap negara (Todaro, 2000).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh J.S Mill dalam Jhingan (2008), dengan meluasnya pasar dan cakupan spesialisasinya, perdagangan internasional

mendorong lebih banyak pemakaian mesin, mendorong penemuan dan pembaharuan, meningkatkan produktivitas buruh, menurunkan biaya dan membawa ke arah pembangunan ekonomi. Selain itu, perdagangan luar negeri memperkenalkan kepada rakyat produk-produk baru dan menarik, serta mendorong mereka untuk bekerja lebih giat menabung dan menghimpun modal bagi pemuasan atas keinginan-keinginan baru. Ia juga mengundang pemasukan modal luar negeri dan membangkitkan gagasan baru, kemampuan teknis, keterampilan, bakat-bakat menajer dan kewiraswastaan. Akhirnya, ia mendorong persaingan sehat dan mencegah monopoli yang tidak efisien.

Produksi pangan dan ekspor hasil panen yang semakin besar tidak hanya menghemat dan memperoleh devisa tetapi juga menyebabkan perluasan sektor perekonomian lainnya. Suatu negara negara membutuhkan sejumlah modal untuk membiayai pembangunan, perluasan infra-struktur, pengembangan industri dasar dan industri berat (Jhingan, 2008).

Modal luar negeri yang ditanam di bidang ekspor biasanya menghasilkan tambahan permintaan tenaga kerja setempat, meningkatnya upah, pembelian pada pasar setempat, sumber-sumber baru pajak, dan, dalam hal konsesi pertambangan, membuahkan rencana bagi-hasil yang menguntungkan. Semua keuntungan ini membantu meningkatkan perluasan ekonomi domestik (Nurske dalam Jhingan, 2008).

Ferroux dalam Kuncoro. M (2002) merupakan orang pertama mengemukakan konsep pusat pertumbuhan ekonomi (*economic growth center*). Ferroux menyatakan pusat pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu tempat dalam suatu ruang atau suatu wilayah, darimana kekuatan-kekuatan sentrifugal

memancar dan kemana kekuatan-kekuatan sentripental ditarik. Di dalam suatu proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi di seluruh wilayah secara serentak melainkan akan bekerja kearah pengelompokan aktivitas ekonomi yang akhirnya membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Setiap pusat pertumbuhan ekonomi akan mempunyai daerah penarikan dan daerah penolakan sampai batas tertentu, sehingga dalam suatu wilayah yang luas akan terbentuk gugusan-gugusan pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*) masing-masing. Konsep pusat pertumbuhan ekonomi ini sebagai suatu gugusan industri-industri, baik yang saling terkait maupun yang berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian berkembang menjadi kota dan berlokasi pada suatu tempat tertentu dalam suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri (Mudrajat Kuncoro dalam Syahza, 2003a). Dengan output yang lebih tinggi lingkaran kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan.

Dalam ilmu ekonomi regional teori pusat pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai salah satu instrumen pembangunan wilayah yang cukup baik karena dapat menimbulkan beraneka efek atau dampak yang positif terhadap pembangunan wilayah yang ada disekitarnya (Richardson dalam Syahza, 2007b).

Teori *economic base* menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu daerah

yang menggunakan sumberdaya produksi lokal, termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan produknya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) di daerah tersebut (Syahza, 2007b).

Pusat pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan efek rembesan ke bawah (*trickling down effect* atau *spread effect*) dan efek polarisasi (*polarization effect* atau *backwash effect*) pada wilayah yang ada disekitarnya (*hinterland*), pendapatan wilayah akan lebih besar jika investasi pembangunan dikonsentrasikan pada pusat pertumbuhan dibandingkan jika investasi pembangunan yang sama digunakan secara menyebar dalam seluruh wilayah yang bersangkutan (Syahza, 2007b).

Hasil penelitian Feng Yao Lee dan William E. Cok dalam Syahza (2007b) menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekspor dan investasi memiliki kontribusi positif terhadap rata-rata pertumbuhan GNP riil. Selanjutnya Saragih. B (2001) menyatakan, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peningkatan konsumsi domestik, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Di masa akan datang ekspor bersih (*net export*) diharapkan cukup besar peranannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganekaragaman jenis dan pemanfaatan lahan perkebunan, lahan kering dan rawa yang ditangani secara lebih intensif dan terpadu. Pertanian berskala besar dengan sistem pertanian modern yang menghasilkan produksi pertanian yang mampu bersaing di pasar luar negeri terus

dikembangkan dan diintensifkan dengan tetap memperhatikan kaitannya yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan pertanian rakyat (Syahza, 2003b).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder (Syahza, 2003b).

Tujuan akhir pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau adalah meningkatkan ekspor nonmigas guna memperoleh sumber devisa. Khususnya ekspor non migas dari sektor perkebunan kelapa sawit adalah ekspor minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil* atau CPO). Devisa ini akan digunakan untuk pembangunan perekonomian Daerah Riau melalui pengembangan investasi baik di sektor pertanian maupun pada sektor non pertanian. Dalam jangka panjang akan terjadi *multiplier effect* perekonomian, dan pada akhirnya merangsang pertumbuhan ekonomi regional daerah Riau (Syahza, 2007b).

Selanjutnya pada saat ini perdagangan minyak kelapa di pasar domestik dan pasar ekspor bersaing dengan minyak sawit sebagai salah satu komoditas substitusi. Adapun permintaan kelapa segar untuk dikonsumsi masyarakat terus

meningkat, hingga mempengaruhi ketersediaan bahan baku minyak kelapa. Potensi produksi kelapa yang cukup besar dan teknologi pengolahan produk kelapa lainnya yang semakin dikuasai, akan memberi peluang diversifikasi agroindustri di Indonesia. Usaha perkebunan rakyat saat ini didominasi areal perkebunan kelapa, karena perkebunan rakyat ditempatkan pada posisi "tulang punggung" pembangunan perkebunan dengan perkebunan besar milik swasta dan BUMN sebagai pendukung dan penunjang (Damanik, 2009).

Sedangkan Menurut Mubyarto dan Dewanta, dalam Sadikin dan Irawan (2009), sumbangan ekspor komoditas karet untuk devisa negara sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1925, khususnya dari daerah Sumatera Timur. Sumbangan tersebut terus meningkat seiring dengan peningkatan permintaan karet-alam dunia. Pada awal masa Orde Baru (1971), sumbangan devisa negara dari karet-alam baru sebesar US \$ 22 juta. Kalau dikaitkan dengan penerimaan ekspor nasional, maka sumbangan dari sektor ini saja mencapai 16%. Pada tahun 1980 penerimaan devisa negara dari sektor perkebunan telah meningkat menjadi US \$ 1.113 juta. Demikian pula halnya yang terjadi dengan pembangunan perkebunan karet-rakyat di Propinsi Riau. Tujuan pembangunan perkebunan skala mikro adalah untuk meningkatkan produksi yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Sedangkan dalam skala yang lebih besar (nasional/makro) pembangunan perkebunan untuk meningkatkan sumbangan devisa negara dari sektor perkebunan. Untuk itu, kemudian pemerintah mengadakan dan melaksanakan berbagai proyek pembangunan perkebunan karet-rakyat, seperti SRDP, PIR/NES dan PRPTE. Menurut Rusli dkk, dalam Sadikin dan Irawan (2009), sebagian besar komoditas perkebunan yang merupakan



komoditas ekspor dihasilkan oleh perkebunan rakyat yang produktivitasnya masih rendah. Memang dengan adanya proyek-proyek perkebunan rakyat tersebut produktivitas karet-rakyat dapat meningkat, dari sebelumnya hanya berkisar antara 300-500 kg/ha/tahun meningkat menjadi 800 kg/ha/tahun.

2.3 Ekspor Subsektor Perkebunan

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain (Wikipedia, 2009).

Ekspor dan impor antara dua negara terjadi apabila suatu negara mengalami kelebihan produksi (*Excess Supply*), dan negara lain mengalami kekurangan produksi (*Excess Demand*) dari konsumsi domestik negara tersebut, atau dengan kata lain terdapat perbedaan penawaran dan permintaan luar antar negara, perbedaan produksi dan konsumsi yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya termasuk teknologi dan selera masing-masing negara, yang mengakibatkan corak kegiatan produksi dan konsumsi berbeda pula. Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, suatu negara harus saling mengadakan perdagangan (pertukaran) dengan negara lain (Gandolfo, Lindert dalam Sukidi 2002).

Untuk memperbesar tingkat pendapatan nasional, tabungan dan investasi bagi pertumbuhan selanjutnya, Jhon Power, dalam Jhingan (2008) menyarankan agar investasi lebih baik dilakukan di bidang-bidang modal dan di sektor ekspor daripada di sektor barang konsumsi.

Di sejumlah negara-negara berkembang yang relatif kecil, sekitar 25 persen hingga 40 persen dari GNP moneternya diperoleh dari penjualan hasil-hasil pertanian dan berbagai produk primer (*primary products*) atau yang sering pula disebut komoditi. Jenis komoditi itu sendiri sangat bervariasi, yakni baik dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak kelapa, gula tebu (perkebunan) sampai dengan nikel dan tembaga (pertambangan) (Todaro, 2000).

Potensi subsektor perkebunan untuk dijadikan andalan ekspor di masa-masa mendatang sebenarnya sangat besar. Prasyarat yang diperlukan "hanyalah" perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai hilir. Mustahil kinerja ekspor akan lebih baik jika kegiatan produksi di sektor hulu, pola perdagangan, dan distribusi komoditas perkebunan domestik masih mengalami banyak hambatan dan distorsi pasar (Bustanil Arifin, 2001).

Komoditas perkebunan mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia melalui : 1) pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), 2) perkembangan produksi dan areal, 3). penyerapan tenaga kerja, 4). sektor perdagangan, 5). pembangunan ekonomi daerah, 6). ketahanan pangan, dan 7) pelestarian lingkungan hidup. Namun dalam perkembangannya untuk meningkatkan peran strategis, daya saing dan nilai tambah, masih diperlukan upaya - upaya khusus oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya (Sinaga,2007).

Menurut Bustanul Arifin (2001), sebenarnya masih terdapat banyak ruang untuk memanfaatkan potensi dan peluang ekspor komoditas perkebunan Indonesia. *Pertama*, perbaikan efisiensi kegiatan pemasaran (transportasi,logistik,

dan administrasi) mengingat Indonesia telah dikenal sebagai *planter* yang paling efisien dibandingkan beberapa produsen komoditas perkebunan seperti Amerika Latin dan Afrika. Keunggulan komparatif karena rendahnya biaya produksi di tingkat kebun ini seharusnya dapat ditransfer sampai pada kegiatan pemasaran dengan cara mengurangi faktor nontektis, seperti biaya siluman dan bahkan pajak ekspor di bidang perdagangan. *Kedua*, upaya pendalaman (*deepening*) pada beberapa komoditas strategis dengan meningkatkan program-program diversifikasi produk dan percepatan pertumbuhan sektor hilir. Upaya ini, walaupun berskala jangka panjang, sangat bermanfaat untuk menambah daya tahan industri komoditas perkebunan dari gejolak pasar internasional produk hilir. Selain meningkatkan nilai tambah (*added-value*), dapat dilaksanakan di dalam negeri, dan dapat menyerap tenaga kerja produktif yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi.

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah. Untuk pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Arah kebijaksanaan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal perkebunan dengan menggunakan sistem perkebunan inti rakyat serta memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta. Sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman dan mobilitas penduduk

serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun ekspor nonmigas (Syahza, 2006).

Lebih lanjut Bungaran Saragih (2001) menyatakan, cara yang paling efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat yaitu sektor agribisnis. Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi nasional yang memberikan prioritas pada pengembangan sektor agribisnis merupakan syarat keharusan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, bahkan pemberdayaan ekonomi nasional.

Saat ini sektor agribisnis Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Pemihakan kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor agribisnis di level makro perlu disertai dengan upaya mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Pengalaman lalu menunjukkan bahwa kontribusi yang besar sektor agribisnis dalam perekonomian nasional ternyata tidak diikuti peningkatan pendapatn petani yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keperpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat (Syahza, 2007b).

Sejak pertengahan tahun 1980-an dikembangkan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa. Hal ini menyebabkan penanaman investasi di daerah Riau menunjukkan dampak terhadap ekonomi masyarakat Riau, karena perkebunan ini terasa memberikan tetesan langsung kepada



masyarakat, berbeda halnya dengan investasi di sektor industri dan perminyakan yang hanya melibatkan golongan tertentu. Perkembangan investasi ini juga memberikan peningkatan perkembangan ekspor, terutama ekspor non migas yang berasal dari sektor pertanian (Syahza, 2003a).

Untuk daerah Riau produk minyak kelapa sawit (CPO) berpotensi besar untuk dijadikan andalan ekspor di luar minyak dan gas bumi, dan bisa menggeser posisi ekspor hasil kayu yang kini sedang mengalami perlambatan. Produk kelapa sawit saat ini menjadi komoditi unggulan daerah Riau selain karet dan kelapa (kopra). Dari sisi penawaran, ekspor CPO mengalami peningkatan yang sangat pesat sekali selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekspor CPO meningkat sebesar 32,9 persen per tahun. Kecenderungan ini diyakini akan terus meningkat, mengingat masih adanya lahan yang belum berproduksi dan perkembangan investasi terutama di sektor perkebunan. Begitu juga animo masyarakat di daerah Riau terhadap perkebunan kelapa sawit masih tinggi (Syahza, 2005).

Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan Daerah Riau memungkinkan dikembangkan perkebunan kelapa sawit. Kondisi Daerah Riau yang relatif datar akan memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanam kelapa sawit akan membuat produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama IMS-GT dan

IMT-GT, tentu saja akan membuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *Kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Syahza, 2002).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota; dapat menciptakan multiplier effect dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan; dan ekspor produk turunan kelapa sawit (CPO) dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah Riau. Tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan telah membawa dampak berkembangnya perkebunan di daerah, khususnya kelapa sawit dan karet. Pembangunan perkebunan ini sekarang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat swadaya (Syahza, 2007a).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau berdampak terhadap ekonomi regional, antara lain: dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat pedesaan; dapat menekan tingkat ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Riau (Syahza, 2006).

Selanjutnya untuk subsektor perkebunan kelapa di daerah Riau juga mempunyai peran penting. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengembangan agroindustri berbasis kelapa di pedesaan, teknologi hasil kegiatan penelitian dapat menjadi faktor kunci. Ketersediaan teknologi tepat guna skala pedesaan yang diintegrasikan dengan industri yang lebih besar atau industri pengolahan lanjut, akan memungkinkan pengembangan pola-pola kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan

pihak industri. Dengan demikian, akan tercipta suatu sistem agroindustri yang memungkinkan petani dan pengusaha menikmati nilai tambah secara adil dan wajar (Mahmud, 2008).

Variabel lain yang juga berperan ikut menentukan tingkat pendapatan petani adalah rantai pemasaran karet, sebab kenyataan menunjukkan bahwa begitu banyaknya lapisan pedagang yang terlibat, sehingga menjadikan rantai tataniaga karet di sini cukup panjang, dan kondisi demikian sudah merupakan suatu fenomena lama. Petani tidak pernah bisa langsung dalam memasarkan produksi karetnya kepada pabrik atau pedagang eksportir. Meski disadari rantai tataniaga yang pendek sulit dijumpai, karena umumnya sentra produksi karet-rakyat di Riau relatif jauh dari pusat kota dengan kondisi jaringan transportasi yang kurang memadai (Sadikin dan Irawan, 2009).

2.4 Daya Saing

Daya saing (*Competitiveness*) mempunyai pengertian dan implikasi yang berbeda pada berbagai level seperti perusahaan, sektor/industri dan negara. Pada level perusahaan daya saing adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh profit. Pada level sektor daya saing adalah kemampuan suatu grup perusahaan bersaing dengan grup perusahaan lainnya dalam sektor yang sama pada negara yang berbeda. Sebuah negara yang berdaya saing bila negara tersebut mampu mempertahankan serta memanfaatkan potensi yang ada pada negara tersebut (Coffin dalam Sukidi 2002).

Suatu negara memperoleh keunggulan daya saing / *competitive advantage* (CA) jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu

negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan memperoleh *competitive advantage* (CA) karena tekanan dan tantangan. Perusahaan menerima manfaat dari adanya persaingan di pasar domestik, supplier domestik yang agresif, serta pasar lokal yang memiliki permintaan tinggi. Perbedaan dalam nilai-nilai nasional, budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah semuanya memberi kontribusi pada keberhasilan dalam persaingan (Porter dalam blogspot,2007).

Daya saing ekspor suatu komoditas adalah kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar negeri yang kemudian memiliki kemampuan untuk mempertahankan pasar tersebut. Daya saing suatu komoditas dapat diukur atas perbandingan pangsa pasar (*Market Share*) komoditas tersebut pada kondisi pasar yang tetap (Amir, 2000).

Hingga saat ini terdapat berbagai variasi dalam mengukur daya saing, dimana pengukurannya sangat tergantung kepada ketersediaan data dan tujuan penelitian. Kebanyakan peneliti menggunakan market share sebagai indikator. Beberapa peneliti memfokuskan pada biaya produksi dan efisiensi (Coffin dkk,1992). Pada penelitian daya saing ekspor komoditi unggulan perkebunan Provinsi Riau dianalisis dengan menggunakan *Revealed Comparative Advantage* (RCA).